

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemberdayaan

##### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari dasar kata “daya” yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan dilakukan dengan upaya agar objek atau seseorang tersebut memiliki tenaga atau kekuatan.<sup>1</sup> Pemberdayaan dapat diartikan sebagai bentuk pengembangan masyarakat dengan menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan problematika dari tiap masing-masing individu maupun kelompok tersebut.<sup>2</sup> Melalui pemberdayaan dapat membentuk seseorang yang lebih sistematis dalam pertumbuhan dan kemajuan perekonomian. Akan tetapi pemberdayaan yang dimaksudkan bukan tentang bagaimana memberdayakan atau mendorong seseorang terus-menerus secara berlebihan. Melainkan dalam bentuk pemberian kesempatan kepada individu atau kelompok agar dapat melakukan kegiatan secara mandiri.

Menurut Suhendra, pemberdayaan merupakan kegiatan yang mendorong semua potensi yang ada untuk terlibat di dalamnya secara berkesinambungan, dinamis, dan sinergis.<sup>3</sup> Sedangkan pemberdayaan karyawan adalah sesuatu yang dilakukan dengan melibatkan karyawan

---

<sup>1</sup>Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman:CV Budi Utama,2019), 1.

<sup>2</sup> Setiyo Yuli Handono, Kliwon Hidayat, dan Mangku Purnomo, *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian* (Malang:UB Press, 2020), 14.

<sup>3</sup>Dwi Iriani Margayaningsih, 76.

untuk bertindak lebih dalam ketika proses kerja.<sup>4</sup> Oleh karena itu, melalui pemberdayaan karyawan dapat menjadi kesempatan yang baik bagi individu atau masyarakat sekitar khususnya yang berdekatan dengan *home industry* untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan diantaranya:

- a. Membentuk individu atau masyarakat yang mandiri, baik dalam hal berpikir, bertindak, maupun mengendalikan apa yang akan dikerjakan.<sup>5</sup>
- b. Memberikan peluang kepada kelompok masyarakat miskin untuk menyalurkan ide atau gagasan yang terbaik bagi individu, keluarga, dan masyarakatnya atas kemampuan yang dimiliki.<sup>6</sup>
- c. Mengasah kemampuan yang dimiliki agar lebih profesional dalam bidangnya
- d. Membentuk dan melatih keterampilan (*softskill*) dalam bidang yang sebelumnya belum dikuasai

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan hanya bersifat sementara sampai masyarakat dapat melakukan kegiatan atau usaha secara mandiri.<sup>7</sup> Meskipun demikian, kemandirian tersebut tidak hanya dibiarkan begitu saja, melainkan tetap dalam pengawasan. Dalam rangka pencapaian kemandirian tentu harus ada semangat, dan kemampuan secara

---

<sup>4</sup>Mustopa dan Lista Meria, “Peran Pemberdayaan, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional terhadap *Turnover Intention*”, *Jurnal System Transformation*, Vol. 2, No. 10, Oktober 2021, 1437-1446, 1438.

<sup>5</sup> Nashar, *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda Dimulai dari Halaman Masjid* (Pamekasan:Duta Media Publishing,2017), 10.

<sup>6</sup>*Ibid*, 10-11.

<sup>7</sup>*Ibid*, 53.

berkelanjutan agar tidak mengalami kemunduran lagi. Sesuai dengan firman Allah SWT yang memerintahkan hamba-Nya untuk mandiri pada QS. An-Najm ayat 39,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : *“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”* (QS. An-Najm:53:39)

Pada ayat tersebut di atas telah jelas bahwa manusia diperintahkan untuk usaha dengan optimal kelak mendapat hasil yang sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Melalui pemberdayaan, manusia dilatih untuk usaha mandiri. Oleh karena itu dalam mencapainya harus melalui tahap-tahap pemberdayaan yang dilaksanakan secara tepat untuk perolehan hasil yang maksimal.

### **3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan**

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya untuk mencapai hasil yang maksimal atas program tersebut. Menurut Suharto, prinsip pemberdayaan terdiri atas : kolaboratif, yakni kolaborasi antar individu; menempatkan individu atau masyarakat sebagai aktor atau pelaku; mengasah kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu; berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan; dan proses pemberdayaan berjalan dinamis, sinergis, dan evolutif.<sup>8</sup>

### **4. Indikator Pemberdayaan**

Pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kemampuan kinerja karyawan yang berperan aktif dan partisipatif sehingga dapat berdampak

---

<sup>8</sup>*Ibid*, 12.

pada kemajuan dan perkembangan perusahaan. Menurut Kuo indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pemberdayaan karyawan yaitu :

a. *Meaning*

Hal ini berpacu pada rasa tujuan atau hubungan pribadi yang mendalam yang dimiliki oleh karyawan tentang pekerjaannya.<sup>9</sup> Melalui keterikatan rasa hubungan antara individu dengan masing-masing pekerjaannya akan dapat menciptakan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan.

b. *Competence*

Hal ini berpacu pada rasa kepercayaan diri karyawan atas kemampuan dan keterampilan yang dimiliki serta diterapkan pada pekerjaan dengan baik<sup>10</sup> Keyakinan akan diri sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar atas tindakan yang akan dilakukan tidak terkecuali pada pekerjaan. Jika seseorang yakin akan kemampuan (*skill*) yang dimiliki maka akan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan. Begitu juga sebaliknya, jika kurang memiliki rasa percaya diri maka akan menghasilkan pekerjaan yang kurang maksimal.

c. *Self-determination*

Hal ini berpacu pada rasa bebas yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya di perusahaan.<sup>11</sup> Ketika individu diberikan ruang dan waktu yang bebas namun tetap pada jalur tugas

---

<sup>9</sup>Kadek Sri Widayanti dan Ni Ketut Sariyathi, "Pengaruh Kepuasan Kerja, Pemberdayaan Karyawan, dan Stres Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada CV Akar Daya Mandiri", *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 11, 2016, 7022-7049, 7031.

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*

pokok dan fungsi dalam melaksanakan pekerjaannya akan lebih santai dan menikmati setiap tugasnya tersebut. Kebebasan juga memberi kenyamanan pada karyawan karena merasa tidak dikekang. Selain itu, kebebasan dalam kerja adalah bentuk gaya kerja yang sesuai keinginannya, namun tetap dapat menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan oleh perusahaan dan mendapatkan keuntungan.<sup>12</sup> Kebebasan yang diberikan kepada karyawan dapat meningkatkan komitmen dan kepuasan yang tinggi pada karyawan karena merasakan hak dan kekuasaan dalam pekerjaannya tersebut.<sup>13</sup> Maka kebebasan ini penting diberikan untuk karyawan agar dapat tercipta pemikiran atau ide baru yang kreatif dan inovatif dalam membantu pengembangan perusahaan.

d. *Impact*

Hal ini berpacu pada rasa kepercayaan karyawan terhadap pengaruh sistem organisasinya atas pekerjaan yang ditekuni.<sup>14</sup> Jika karyawan percaya pekerjaan bahwa individu tersebut berpengaruh besar terhadap sistem organisasi di perusahaan maka akan memiliki jiwa semangat ketika melaksanakan pekerjaannya tersebut.

---

<sup>12</sup>Widyarini dan Sugiarto, "Pengaruh Kebebasan dalam Bekerja, Lingkungan Keluarga dan Keberanian Mengambil Resiko terhadap Minat Berwirausaha (Studi pada Mahasiswa Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta)", *Jurnal Az-Zarqa'*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014, 125-143, 127.

<sup>13</sup>Mustopa dan Lista Meria, "Peran Pemberdayaan, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional terhadap *Turnover Intention*", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 10, Oktober 2021, 1437-1446, 1438.

<sup>14</sup>Kadek Sri Widayanti dan Ni Ketut Sariyathi, 7031.

Melalui indikator pemberdayaan tersebut di atas, dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan karyawan pada *home industry* sesuai dengan tujuannya.

## B. Kesejahteraan

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kata turunan sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, makmur, dan selamat (bebas dari segala ancaman).<sup>15</sup> Kata sejahtera juga makna dari bahasa sanksekerta “*catera*” yang memiliki arti bahwa orang yang sejahtera, lahir maupun batin sehingga hidupnya bahagia dan tenteram.<sup>16</sup> Kesejahteraan ini juga berkaitan dengan proses pembangunan yang ingin dicapai dalam suatu negara, terutama dalam pembangunan ekonomi. Kesejahteraan yang sebenarnya dapat tercipta melalui kolaborasi yang seimbang antara ekonomi yang tumbuh, distribusi yang lancar agar pertumbuhan dengan modal yang diberikan (*growth with equity*) dapat terlaksana sesuai yang tercantum pada QS al-Quraisy ayat 1-4.<sup>17</sup> Ayat tersebut menjelaskan tentang kesejahteraan yang terbebas dari rasa lapar dan takut letak penegasan ayatnya terdapat pada ayat 4.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (QS. Al-Quraisy:4)

<sup>15</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2016.

<sup>16</sup>Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justicia Islamica, 2014, 21-42, 26, <https://www.academia.edu/download/49346327/91-142-1-SM.pdf>, diakses pada 15 Oktober 2022, pukul 06.00 WIB.

<sup>17</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), 28.

Islam menjelaskan konsep kesejahteraan ini sangat komprehensif. Tidak seperti konsep kesejahteraan pada ekonomi kapitalis ataupun sosialis yang didalamnya hanya tentang kesejahteraan material saja. Berbeda dengan kesejahteraan Islam yang menekankan segala hal baik material, spiritual, maupun moral. Kesejahteraan Islam juga berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat kelak.<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menjelaskan tentang pengertian kesejahteraan sosial merupakan tatanan dari kehidupan baik material dan spiritual yang didalamnya terdapat rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat yang sesuai dengan Pancasila.<sup>19</sup>

Kesejahteraan sosial juga bagian dari keadilan sosial yang harus dirasakan oleh setiap orang. Kesejahteraan sosial merupakan milik seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada Pancasila, sila kelima. Kesejahteraan telah menjadi cita-cita para leluhur yang menjadi tujuan nasional dan harus diperjuangkan untuk seluruh rakyat yang tidak hanya dominan pada individu ataupun golongan tertentu.<sup>20</sup>

Kesejahteraan yang diperoleh oleh karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan akan dapat membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Menurut

---

<sup>18</sup> Jamaludin Acmad Kholik, "Hukum Menginvestsikan Zakat dan Urgensinya sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan", *Universum : Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 2, Juli 2016, 139-153, 141.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

<sup>20</sup> Balthasar Watunglawar dan Katarina Leba, "Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. I, No. I, 2020, 10-24, 19.

BKKBN keluarga sejahtera merupakan bentuk hasil dari pernikahan yang sah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak baik spiritual maupun materiil, taqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, menciptakan dan menjaga hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang antara antar keluarga dengan masyarakat maupun lingkungan sekitar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009. Tingkat kesejahteraan terdapat lima tahapan yang telah dikelompokkan yaitu :<sup>21</sup>

- a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) merupakan keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera (KS) I atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera (KS) I merupakan keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan keluarga sejahtera tingkat I, akan tetapi tidak memenuhi salah satu indikator pada keluarga sejahtera tingkat II yaitu indikator kebutuhan psikologis keluarga (*psychological needs*).
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera (KS) II merupakan keluarga yang mampu memenuhi enam indikator pada kategori keluarga sejahtera tingkat I dan 8 indikator pada kategori keluarga sejahtera tingkat II, akan tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator keluarga sejahtera III yaitu pada indikator kebutuhan pengembangan keluarga (*development needs*).
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera (KS) III merupakan keluarga yang mampu memenuhi enam indikator pada keluarga sejahtera I, 8 indikator keluarga

---

<sup>21</sup><http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, diakses pada 08 Mei 2023, pukul 19.47 WIB.

sejahtera II, lima indikator keluarga sejahtera III, akan tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator pada indikator keluarga sejahtera III plus yaitu pada indikator aktualisasi diri (*self esteem*).

- e. Tahapan Keluarga Sejahtera (KS) III plus merupakan keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari enam indikator keluarga sejahtera I, 8 indikator keluarga sejahtera II, lima indikator keluarga sejahtera III, dan dua indikator keluarga sejahtera III plus.<sup>22</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan merupakan tingkat perkembangan kesejahteraan yang berkaitan dengan penduduk, tingkat kualitas kesehatan dan gizi, tingkat pendidikan, pendayaan ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi tiap individu, tingkat kemiskinan, serta keadaan sosial lainnya yang menjadi patokan dalam meningkatkan kualitas hidup baik pada individu maupun masyarakat.<sup>23</sup> Indikator kesejahteraan dapat dikategorikan sesuai dengan masing-masing tingkatannya.<sup>24</sup> Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terdapat lima tingkatan kesejahteraan, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*) terdiri dari :

---

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*, 2021, [https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html#:~:text=Indikator%20Kesejahteraan%20Rakyat%202021%20merupakan,tinggal%20\(perkotaan%20dan%20perdesaan\)](https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html#:~:text=Indikator%20Kesejahteraan%20Rakyat%202021%20merupakan,tinggal%20(perkotaan%20dan%20perdesaan)), diakses pada 18 Oktober 2022, pukul 11.40 WIB.

<sup>24</sup>Dini Puspita, Suparti, dan Yuciana Wilandari, *Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013)*, Jurnal Gaussian, Vol 3, No. 4, 2014, 645-653, 646-647.

<sup>25</sup>*Ibid*

- 1) Anggota keluarga minimal sehari makan dua kali atau lebih
  - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda yang digunakan di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
  - 3) Tempat tinggal keluarga terdapat atap, lantai, dan dinding yang baik
  - 4) Jika terdapat anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
  - 5) Jika terdapat pasangan pada usia subur ingin melaksanakan keluarga berencana (KB) pergi ke pelayanan kontrasepsi
  - 6) Anak dalam keluarga yang memiliki umur 7-15 tahun dalam keadaan bersekolah
- b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*) terdiri dari :
- 1) Anggota keluarga melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing
  - 2) Anggota keluarga keseluruhan minimal satu minggu sekali makan daging/ikan/telur
  - 3) Anggota keluarga keseluruhan dalam satu tahun minimal mendapatkan satu pasang pakaian baru
  - 4) Luas lantai rumah untuk setiap penghuninya minimal  $8m^2$
  - 5) Kurun waktu tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan masing-masing tugasnya
  - 6) Anggota keluarga bekerja untuk mendapatkan penghasilan

- 7) Anggota keluarga keseluruhan dalam usia 10-60 tahun dapat membaca
  - 8) Pasangan usia subur yang memiliki anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi<sup>26</sup>
- c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator kebutuhan pengembangan (*develomental needs*) terdiri dari:
- 1) Keluarga berusaha meningkatkan pengetahuannya tentang keagamaan
  - 2) Uang atau barang merupakan bentuk tabungan dari sebagian penghasilan keluarga
  - 3) Makan bersama yang menjadi rutinan keluarga minimal satu minggu sekali untuk meningkatkan komunikasi
  - 4) Keluarga mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar
  - 5) Keluarga mendapatkan suatu informasi yang diperoleh dari surat kabar/majalah/radio/internet
- d. Indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator aktualisasi diri (*self esteem*) terdiri dari:
- 1) Keluarga rutin melakukan donasi materiil untuk kegiatan sosial

---

<sup>26</sup> Dini Puspita, Suparti, dan Yuciana Wilandari, *Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013)*, Jurnal Gaussian, Vol 3, No. 4, 2014, 645-653, 646-647.

- 2) Terdapat anggota keluarga yang aktif dalam organisasi yang menjadi pengurus perkumpulan sosial/institusi/yayasan masyarakat.<sup>27</sup>

Pada kitab *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa konsep dari kesejahteraan tergantung pada pencarian dan pemeliharaan tujuan dasar yakni :

- a. Pemeliharaan agama (*al-din*)

Pemeliharaan agama harus dilaksanakan dengan baik sebab termasuk primer seperti menjalankan ibadah shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat, dan sebagainya. Apabila hal ini dibiarkan akan berakibat pada runtuhnya agama. Kehidupan akan dipenuhi dengan rasa ketidaaktenangan jika tidak ada agama. Ajaran pemeliharaan agama ini dapat dilakukan dengan berbagai aspek seperti : beriman, menjalankan ibadah shalat, melaksanakan kewajiban berpuasa, mengeluarkan zakat, dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu.

- b. Pemeliharaan jiwa (*nafs*)

Pemeliharaan jiwa dilakukan dengan memenuhi segala kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang dimaksudkan adalah kebutuhan makan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia dalam keadaan terancam, baik kesejahteraannya ataupun kehidupannya.

---

<sup>27</sup> Dini Puspita, Suparti, dan Yuciana Wilandari, *Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013)*, Jurnal Gaussian, Vol 3, No. 4, 2014, 645-653, 646-647.

c. Pemeliharaan akal (*aql*)

Akal merupakan suatu anugrah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Maka dari itu akal harus menjadi prioritas untuk dipelihara sebab akal juga menjadi bagian dari kehidupan jiwa. Akal berfungsi untuk membawa manfaat bagi orang lain dalam aspek apapun salah satunya pada aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya menggunakan akal saja untuk mendongkrak keberhasilan. Namun, aspek ini membutuhkan suatu ilmu atau wawasan. Ilmu ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau non formal. Pendidikan formal ini dapat diperoleh melalui bersekolah sedangkan pendidikan non formal dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan yang tujuannya untuk menambah *skill* dan wawasan. Hal-Hal tersebut memiliki tugas yang dasar yaitu menjaga dan memelihara akal.

d. Pemeliharaan keturunan (*nasl*)

Keturunan merupakan suatu elemen yang harus dijaga dan tidak boleh diabaikan karena dalam ajaran Islam dilarangnya zina juga bagian dari pemeliharaan jiwa dalam bentuk menjaga keutuhan keturunan. Keturunan pada dasarnya memberikan generasi muda yang harus dididik sedini mungkin serta mengajarkan nilai-nilai akhlak dan moral yang mulia.

e. Pemeliharaan harta (*mal*)<sup>28</sup>

Harta atau kekayaan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Harta menjadi modal (*goal*) manusia dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memelihara harta dapat dilakukan dengan cara mencari rezeki dan segala aktivitas ekonomi yang halal dilakukan tanpa mengambil hak dari orang lain.

Dalam Islam juga telah dijelaskan mengenai indikator kesejahteraan yang tidak hanya terletak pada nilai materi saja, melainkan juga non-material, seperti kebutuhan spiritual, nilai-nilai moral, dan tercapainya keharmonisan sosial. Al-Ghazali juga merumuskan hubungan kesejahteraan dengan aktivitas ekonomi. Terdapat tiga alasan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi menurut Al-Ghazali yaitu:<sup>29</sup>

- a. Pemenuhan kebutuhan hidup yang bersangkutan
- b. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- c. Memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan

Melalui kegiatan ekonomi, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, baik individu maupun kelompok masyarakat. Selain itu, ketika seseorang telah dapat dikatakan sejahtera, maka dapat melaksanakan perintah Allah SWT yang hukumnya sunnah seperti sedekah.

---

<sup>28</sup>Havis Aravik, *EKONOMI ISLAM* (Malang:Empatdua,2016), 202.

<sup>29</sup>*Ibid*, 202.